

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini di peroleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas antara lain :

1. Keterwakilan perempuan di Partai Politik Golkar di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Komposisi jumlah perempuan dalam kepengurusan Partai Golkar selama tiga periode 2009-2015 mengalami penurunan sementara 2015-2019 mengalami peningkatan. Upaya yang dilakukan Partai Golkar dalam pemenuhan keterwakilan Perempuannya dengan cara mendirikan kaderisasi perempuan, membentuk KPPG dan menggunakan rektrumen dengan sistem terbuka. Kendala yang terdapat dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada Partai Politik yaitu adanya hambatan sistem politik, hambatan sosial kultural dan hambatan psikologis.
2. Bawaslu telah menentukan akibat hukum apabila tidak mencapainya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam calon legislative (bacaleg) yaitu akan tercoret dan tidak ada keterwakilan untuk daerah pilihan (dapil) yang tidak bisa memenuhi keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan pada daftar calon sementara anggota DPRD Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 yang terbagi menjadi 8 daerah pilihan yang tiap daerah memiliki jumlah keterwakilan perempuan yang telah mencapai angka yang ditentukan oleh Undang-undang No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Saran

1. Perlunya kesadaran masyarakat terutama kaum perempuan dalam menjaring aspirasi kedalam suatu organisasi yaitu sebuah Partai Politik melalui keterlibatan didalam kepengurusan sebuah Partai Politik agar kaum perempuan lebih aspiratif dan tidak merasakan diskriminasi terhadap perempuan.
2. Anggota kepengurusan laki-laki dalam sebuah Partai Politik harus bekerja sama dengan mendukung upaya yang dilakukan anggota kepengurusan perempuan. Memberikan kesempatan perempuan untuk menunjukkan ide dan gagasan terkait aspirasi perempuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.